



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARBAIN ASYARI

2. Jabatan : LURAH KARANG MUMUS

3. NHK : 194710

II. DATA HARTA

Α.	TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	150.000.000
	1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/80 m2 di KAB /	KOTA	
all .	SAMARINDA , HASIL SENDIRI , Rp. 150.000.000	all .	al . al
B.	ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.000.000
	1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SE	NDIRI	
OK-	Rp. 5.000.00 <mark>0</mark>	WOK-	10K 10K
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	
D.	SURAT BERHARGA	Rp.	al al
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	
PI	Sub Total	Rp.	160.000.000
III. HU	TANG	Rp.	
IV. TO	TAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	160.000.000

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASPIANI

2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KELURAHAN KARANG MUMUS

3. NHK : 996957

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 300.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 9000 m2/1600 m2 di KAB / KOTA

KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 95.000.000

1. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

2. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

80.000.000

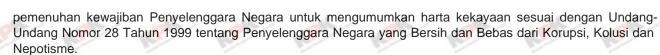
D. SURAT BERHARGA Rp. E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.500.000 F. HARTA LAINNYA Rp. Sub Total Rp. 403.500.000 III. HUTANG Rp. 267.578.659 IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 135.921.341	C. HARTA BERGERAK L	AINNYA	Rp.	
F. HARTA LAINNYA Rp Sub Total Rp. 403.500.000 III. HUTANG Rp. 267.578.659	D. SURAT BERHARGA	KOK KOK	Rp.	CON KINE
Sub Total Rp. 403.500.000 III. HUTANG Rp. 267.578.659	E. KAS DAN SETARA KA	as	Rp.	8.500.000
III. HUTANG Rp. 267.578.659	F. HARTA LAINNYA	OK OK	Rp.	ok oth
all all all all all all all all	Sub Total		Rp.	403.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 135.921.341	III. HUTANG		Rp.	267.578.659
	IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN	1 (11-111)	Rp.	135.921.341

Catatan:

- 1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

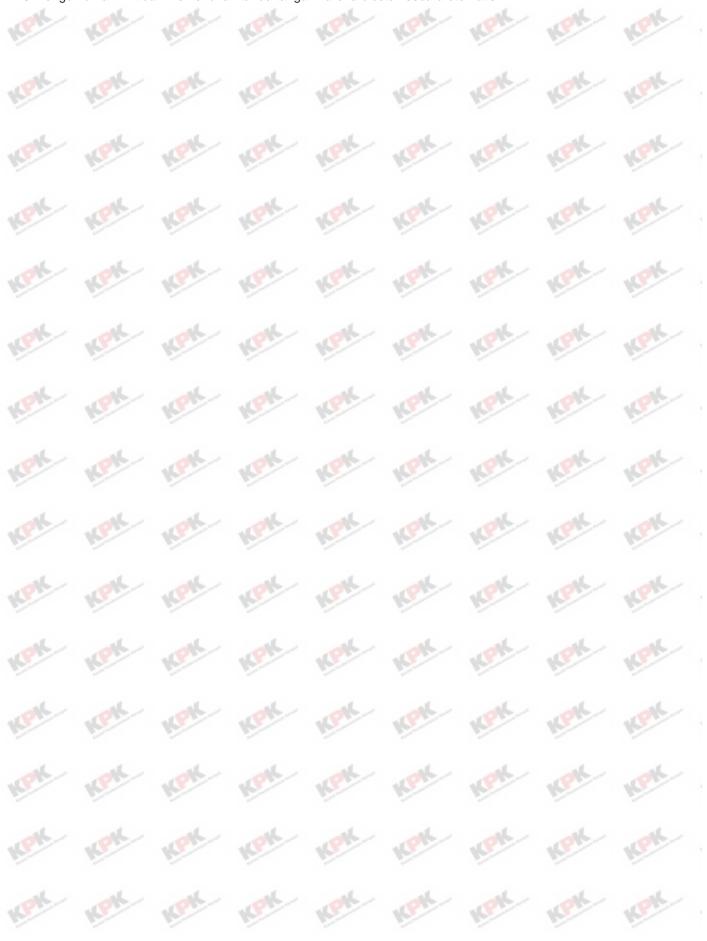






3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Komisi Pemberantasan Korupsi







PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NYAMI

2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELURAHAN KARANG MUMUS

3. NHK : 1000941

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/380 m2 di KOTA SAMARINDA, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.000.000

1. MOTOR, HONDA EF02N12M2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	ab _ at
D. SURAT BERHARGA	Rp.	NO.
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	N/PI
Sub Total	Rp.	1.007.100.000
HUTANG	Rp.	541.820.080
TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	465.279.920

Catatan:

III.

^{1.} Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





- 2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

